



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:



POSITIF



NETRAL



NEGATIF

Pemkab Kaur Terima Pengembalian KN Rp6,5 Miliar

BINTUHAN - Di tahun 2024 yang lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaur menerima pengembalian Kerugian Negara (KN) Rp6,5 miliar dari beberapa OPD.

Adapun rinciannya adalah dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari keuangan daerah sebesar Rp2,5 miliar dan juga pengembalian atas perjalanan dinas Rp3,5 miliar.

Uang tersebut saat ini semuanya sudah dihimpun, dan sudah dikembalikan ke Kas Negara sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaur, Purwanto, SE, mengatakan uang pemulihan KN tersebut berhasil dihimpun dari beberapa kegiatan di ruang lingkup Pemkab Kaur.

Dimana yang paling besar adalah uang dari pengembalian perjalanan dinas.

"Tahun lalu untuk KN, berhasil dipulihkan sebanyak Rp6,5 miliar dari beberapa kegiatan. Paling banyak dari perjalanan dinas," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, salah satu kegiatan perjalanan di-

nas yang menyebabkan kerugian negara paling berat itu diantaranya di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kaur.

Namun untuk rincian nama-nama atau orang yang melakukan pengembalian Purwanto tidak bisa menjelaskan karena itu bukan ranahnya.

"Paling banyak pengembalian perjalanan dinas itu memang di Setwan Kaur. Rinciannya saya kurang tahu," ujarnya.

Untuk tahun 2025 ini, Purwanto mengaku sama sekali belum menerima laporan atau rekapan pengembalian KN.

Biasanya, pengembalian KN baru akan dilakukan setelah proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah selesai.

Setiap OPD nanti pasti akan memberikan laporan kerugian mana saja yang menimbulkan TGR untuk diselesaikan.

"Kalau tahun ini pembayaran pemulihan KN belum ada. Biasanya akan dilakukan setelah penghitungan dari BPK selesai," terangnya.

Sebagai informasi, sejak beberapa waktu yang lalu BPK mulai melakukan pemeriksaan keuangan di ruang lingkup Pemkab Kaur.

Semua OPD bakal dimasuki untuk dimintai keterangan terkait dengan realisasi kegiatan di tahun 2024 yang lalu. (cil)